



**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “TIRTA SARI”**

SKRIPSI

**Oleh:
Anggun Sabella
120810301146**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “TIRTA SARI”**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

ANGGUN SABELLA
120810301146

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. dan dengan mengucap rasa syukur yang tiada henti, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, papaku Mujiono dan mamaku Sarmiani serta papa tiriku Burhanuddin yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungannya, mulai dari doa, nasihat, materi, dan semua yang mereka berikan dengan tulus di setiap langkahku;
2. Para pendidik, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang senantiasa memberiku ilmu yang bermanfaat dengan penuh rasa ikhlas;
3. Almamaterku tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tempat dimana aku menimba ilmu dan pengalaman sebagai bekal di kehidupan yang lebih tinggi; dan
4. Untuk sahabat-sahabatku Niken, Arum, Wafa, Jefri terimakasih atas semangat dan doa kalian, semoga persahabatan kita berlanjut hingga tua nanti dan juga untuk Vena teman seperjuanganku mengerjakan skripsi.
5. Untuk semua teman-temanku tercinta yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda dan tawa mereka yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra’du ayat 11)

“...Sebaik-baiknya ilmu yang anda miliki adalah yang memberikan manfaat...”

(DR. ‘Aidh Al-Qarni)

“Apa yang telah berlalu tidak akan kembali, masa depan juga sesuatu yang misteri. Kehidupan sebenarnya adalah waktu di mana Anda berada sekarang”.

(Dr. Ibrahim Fiqhy dalam bukunya Agar Gelisah Bernilai Ibadah)

“Aku memandang sisi kehidupan yang cerah dan merenungi kesulitan dengan keyakinan bahwa tantangan dapat diatasi dan segala sesuatu dapat berubah menanda baik, karena aku beriman pada Allah, percaya pada diriku dan sesama”

(Carmen 1992)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Sabella

NIM : 120810301146

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Agustus 2016

Yang menyatakan,

ANGGUN SABELLA

NIM. 120810301146

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “TIRTA SARI”**

Oleh :

Anggun Sabella

120810301146

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Bunga Maharani SE., MSA

Dosen Pembimbing II : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari

Nama Mahasiswa : Anggun Sabella

N I M : 120810301146

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 05 Maret 2016

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Bunga Maharani SE., MSA
NIP. 198503012010122005

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak
NIP. 196608051992012001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) TIRTA SARI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anggun Sabella

NIM : 120810301146

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Agustus 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak (.....)
NIP. 19720416 200112 1001
Sekretaris : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19710217 200003 1001
Anggota : Dewi Ayu Puspita S.E., Ak., MSA. (.....)
NIP. 19860216 201504 2003

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) TIRTA SARI

ANGGUN SABELLA

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

SAK ETAP merupakan solusi dari masalah yang kerap menerpa koperasi, yaitu masalah pengelolaan keuangan. Sebagai standar yang ditujukan untuk memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipahami oleh pihak eksternal perusahaan, SAK ETAP seharusnya sudah banyak diketahui atau bahkan diterapkan oleh koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari di Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang terdiri dari ketua dan kasir KSP Tirta Sari yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaporan keuangan pada KSP Tirta Sari tersebut sebesar 76% telah sesuai dengan SAK ETAP dan sisanya sebesar 24% belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP ternyata masih belum benar-benar dikuasai oleh para pelaku koperasi. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah karena latar belakang pendidikan, selain itu disebabkan pula oleh sosialisasi atau pun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi koperasi masih kurang maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih kurang dipahami pelaku koperasi. Untuk para pelaku koperasi diharapkan di masa yang akan datang akan menerapkan laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP.

Kata kunci: SAK ETAP, koperasi, laporan keuangan.

ABSTRACT

**SAK ETAP IMPLEMENTATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS ON
COOPERATIVE TIRTA SARI**

ANGGUN SABELLA

Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

SAK ETAP is a problem solution that usually occurs in economic enterprise (cooperation), called financial management issues. As a standard that is intended to facilitate the cooperation in financial report which is accountable and can be understood by external companies, SAK ETAP should have known or even applied by cooperatives. The purpose of this study is to investigate the application of SAK ETAP in the financial report KSP ETAP Tirta Sari in Banyuwangi. This research applies qualitative research and descriptive approach. Sources of the data is obtained from interviews and documentary. The informant in this study were two people consist of the chairman and the cashier of KSP Tirta Sari. The survey reveals that the financial report on the KSP Tirta Sari is 76 % equals with SAK ETAP and the rest 24% is not equals with SAK ETAP, because the financial report is not made yet. SAK ETAP has not yet been completely understood by the cooperative worker. One of the reason is because the educational background. Besides, it also because if the socialization and the training from the government is not maximum. So, the cooperative worker cannot fully understand what SAK ETAP means and how to apply in their daily work. It expected for the cooperative worker to apply the fully financial report based on SAK ETAP.

Keywords: *SAK ETAP, SMEs, financial statements.*

RINGKASAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari; Anggun Sabella, 120810301146; 2016: 78 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional akan semakin besar. Para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan. Sejak 1 Januari 2012 standar akuntansi keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan surat edaran Deputy Bidang Kelembagaan KUKM No.200/SE/Dep.1/XII/2012. Proses penyesuaiannya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pembina melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.4/Per/M.KUKM/VII/2012 pada 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pelaku koperasi dan pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya serta membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan lain. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Objek penelitian yang dipilih adalah KSP Tirta Sari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data berupa wawancara serta dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan peneliti untuk mencapai kriteria tersebut terdiri atas triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Tahapan pada penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi laporan keuangan yang sudah disajikan oleh KSP Tirta Sari. Dari proses identifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa 76% laporan keuangan yang disusun oleh KSP Tirta Sari sudah sesuai dengan SAK ETAP dan sisanya sebesar 24% yang belum sesuai dengan SAK ETAP. Ketidaksesuaian tersebut meliputi: aset tetap belum diakui secara terpisah di dalam neraca, belum mengakui akumulasi penyusutan aset tetap secara terpisah atas masing-masing akumulasi penyusutan aset tetap dan belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan. Bagi koperasi, standar akuntansi yang berlaku adalah SAK ETAP. Dengan demikian, laporan keuangan KSP Tirta Sari seharusnya dilengkapi sesuai dengan kaidah SAK ETAP yaitu berupa laporan keuangan lengkap entitas yang meliputi: neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan KSP Tirta Sari”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Ibu Bunga Maharani, SE., MSA dan Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Indah Purnamawati, SE., M. Si, Ak. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Bapak Heri Satimun, Bapak H. Sukarno, Bapak Budi Nuratim, dan Mbak Sundari selaku ketua, sekretaris, bendahara, dan kasir di KSP Tirta Sari yang menjadi obyek penelitian, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan untuk penulisan skripsi ini;
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
8. Teman-teman Akuntansi 2012, terima kasih atas dukungan dan doa kalian yang telah memberikan warna dikehidupan kuliahku jangan pernah menyerah oleh satu hambatan kawan. Ayo terus berjuang;

9. Teman-teman kost Jawa 4C no.15 Mbak Rere, Mbak Cha, Puspa, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu per satu terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan;
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan akan memberikan sumbangasih bagi Universitas Jember.

Jember, 29 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Koperasi.....	8
2.1.1 Pengertian Koperasi	8
2.1.2 Tujuan Koperasi	8
2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi	9
2.1.4 Landasan Hukum Dan Azas Koperasi	9

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi	10
2.2 Koperasi Simpan Pinjam	11
2.3 Standar Akuntansi Koperasi	12
2.4 SAK ETAP	14
2.5 Kebijakan Akuntansi Menurut Sak Etap	15
2.5.1 Pengakuan	15
2.5.2 Pengukuran	17
2.5.3 Penyajian	18
2.6 Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP	19
2.6.1 Neraca	19
2.6.2 Laporan Laba/Rugi.....	19
2.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	20
2.6.4 Laporan Arus Kas	21
2.6.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Sumber Penelitian.....	25
3.3 Teknik Penelitian.....	26
3.4 Lokasi Objek Penelitian.....	27
3.5 Keabsahan Data.....	27
3.6 Analisis Data	28
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	30
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1 Sejarah Singkat KSP Tirta Sari.....	31
4.1.2 Struktur Organisasi	31
4.2 Standar Akuntansi untuk KSP Tirta Sari.....	34
4.3 Definisi Pos-pos dalam Laporan Keuangan KSP Tirta Sari	40

4.3.1 Aset	40
4.3.3 Kewajiban	41
4.3.4 Ekuitas	42
4.3.4 Penghasilan.....	43
4.3.5 Beban.....	43
4.4 Pengakuan dan Pengukuran Pos-pos dalam Laporan	
Keuangan KSP Tirta Sari.....	44
4.4.1 Aset	44
4.4.2 Kewajiban	51
4.4.3 Ekuitas	52
4.4.4 Penghasilan	56
4.4.5 Beban	58
4.5 Penyajian dan Pengungkapan	59
4.5.1 Neraca	59
4.5.2 Laporan Laba Rugi.....	60
4.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
4.5.3 Laporan Arus Kas	62
4.5.4 Catatan Atas Laporan keuangan (CALK).....	64
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

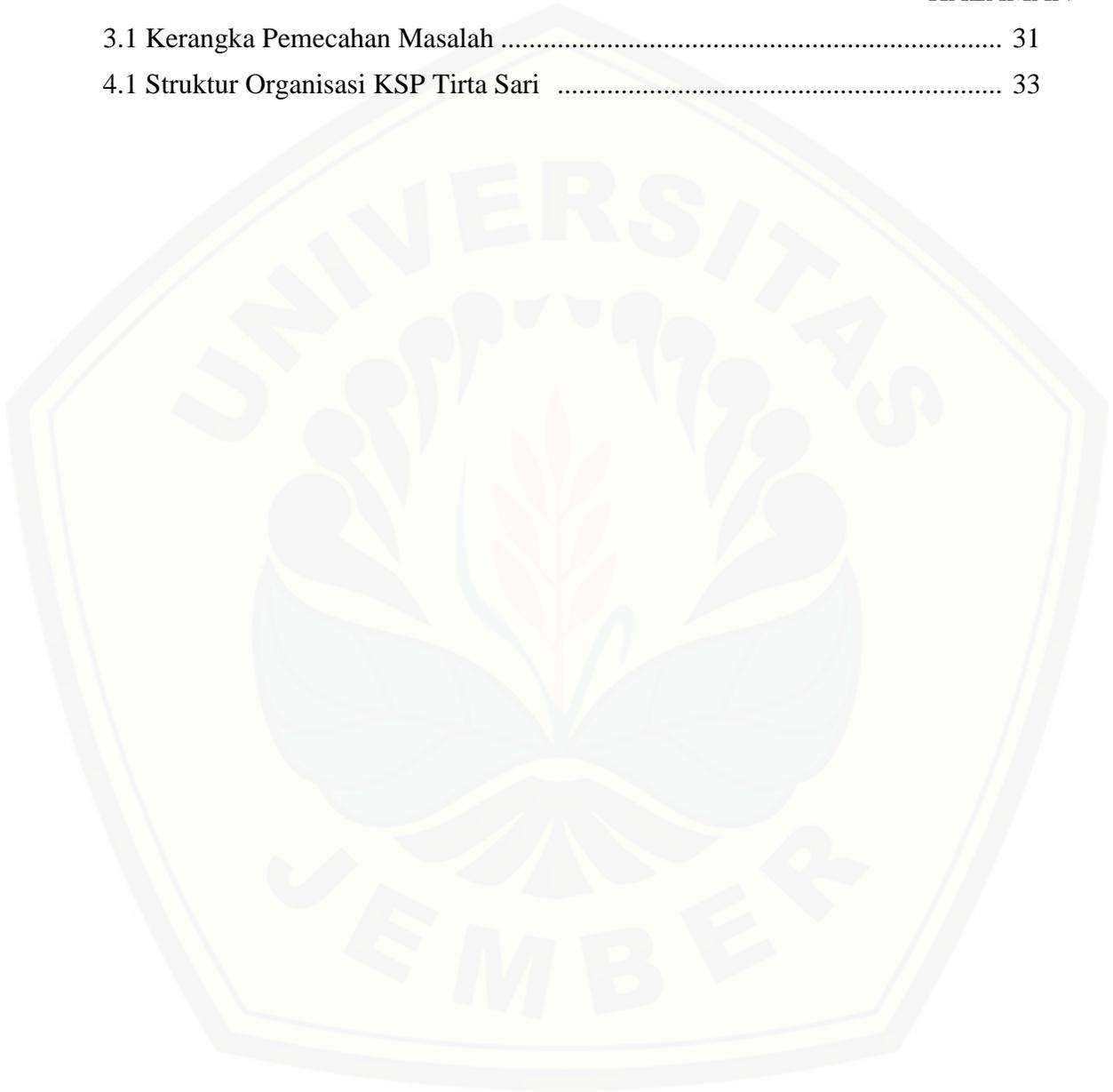
DAFTAR TABEL

	HALAMAN
1.1 Daftar Nama dan Tahun Pendirian KSP kabupaten Banyuwangi.....	4
4.1 Neraca KSP Tirta Sari.....	36
4.2 Laporan Laba Rugi KSP Tirta Sari.....	37
4.3 Laporan Perubahan Ekuitas KSP Tirta Sari.....	38
4.4 Laporan Arus Kas KSP Tirta Sari.....	39
4.5 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Kas dan setara kas pada KSP Tirta Sari.....	45
4.6 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Piutang pada KSP Tirta Sari.....	46
4.7 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Penyisihan Penghapusan Pinjaman pada KSP Tirta Sari.....	47
4.8 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Beban Dibayar Di Muka Pada KSP Tirta Sari.....	48
4.9 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Aset Tetap pada KSP Tirta Sari.....	49
4.10 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada KSP Tirta Sari.....	50
4.11 Rincian Penyusutan Aset Tetap pada KSP Tirta Sari.....	50
4.12 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Kewajiban pada KSP Tirta Sari.....	51
4.13 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Simpanan Pokok pada KSP Tirta Sari.....	52
4.14 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Simpanan Wajib pada KSP Tirta Sari.....	53
4.15 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Modal Penyertaan pada KSP Tirta Sari.....	53
4.16 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Cadangan Umum dan	

Cadangan Risiko pada KSP Tirta Sari	54
4.17 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Modal Donasi pada KSP Tirta Sari.....	55
4.18 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap SHU Belum Dibagi pada KSP Tirta Sari	55
4.19 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Penghasilan pada KSP Tirta Sari.....	56
4.20 Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap Beban pada KSP Tirta Sari	58
4.21 Analisis Penerapan SAK ETAP pada Neraca KSP Tirta Sari.....	59
4.22 Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Laba Rugi KSP Tirta Sari	61
4.23 Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Perubahan Ekuitas KSP Tirta Sari	62
4.24 Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Arus Kas KSP Tirta Sari...	63
4.25 Analisis Penerapan SAK ETAP pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) KSP Tirta Sari.....	64
4.26 Analisis Kesesuaian Akun-akun Pada Laporan Keuangan KSP Tirta Sari Berdasarkan SAK ETAP.....	65

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	31
4.1 Struktur Organisasi KSP Tirta Sari	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Prasetiawan, 2015:1). Selain itu, koperasi juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usahanya, misalnya melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Koperasi bersama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan peningkatan perekonomian nasional, memperkuat perekonomian rakyat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Nurdita, dalam Prasetiawan, 2015:2).

Kerbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya

koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria, dalam Hertiyo 2015:2).

Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan koperasi mulai disesuaikan dengan laporan keuangan IFRS. Penyesuaian tersebut diawali dengan Penerbitan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No.8 pada 8 April 2011 dan secara resmi PSAK Nomor 27 untuk Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi (Heriyanto, 2012). Sebagai gantinya, Kementerian Koperasi dan UKM memberlakukan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman akuntansi yang baru bagi koperasi maupun UKM. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum (Mardiasmo, dalam Prasetiawan 2015:3).

Sejak 1 Januari 2012 standar akuntansi keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan surat edaran Deputy Bidang Kelembagaan KUKM No.200/SE/Dep.1/XII/2012. Proses penyesuaiannya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pembina melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.4/Per/M.KUKM/VII/2012 pada 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (Heriyanto, 2012).

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (i) seluruh

perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2013:12-13).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengacu pada *The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs)*. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pelaku koperasi dan pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya serta membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan lain. SAK ETAP digunakan bagi perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI, 2013:1). Diharapkan dengan adanya SAK ETAP akan menjawab kesulitan para pelaku koperasi dan UKM dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi suatu pelaporan keuangan yang efektif namun juga tidak serumit SAK Umum, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi ke depannya.

Komitmen nyata bidang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dicanangkan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Banyuwangi, tahun 2013 – 2014 mendapat apresiasi dari Presiden dan Menteri Koperasi dan UMKM RI. Banyuwangi dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan

ekonomi kerakyatan melalui koperasi aktif dan sehat. Untuk koperasi aktif dan sehat Banyuwangi ada 732 lembaga dari 866 lembaga koperasi yang ada, sedangkan sisanya berjumlah 134 lembaga merupakan koperasi yang tidak aktif. Dari ratusan jumlah koperasi yang ada di Banyuwangi termasuk diantaranya adalah koperasi simpan pinjam. Beberapa daftar nama koperasi simpan pinjam (KSP) yang ada di kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Daftar Nama dan Tahun Pendirian KSP kabupaten Banyuwangi

Nama KSP	Tahun Pendirian
KSP Tirta Sari	1983
KSP Milan	1999
KSP Jamu	2000
KSP Jaya Artha	2000
KSP Arum	2001
KSP Tiara	2002
KSP Agus	2003
KSP Mitra Usaha	2003
KSP Rizki Sakinah	2004
KSP Artha Makmur	2004

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari yang beralamat di jalan Kembiritan no.20 kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur. Koperasi ini berdiri pada tahun 1983 dan hingga akhir tahun 2015 memiliki anggota sebanyak 525 orang. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan koperasi maupun simpanan berjangka dari anggota koperasi dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk dana pinjaman.

Keberadaan KSP Tirta Sari memiliki peran yang penting untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Permasalahan

yang sering muncul pada KSP Tirta Sari adalah keterbatasan dana. Pihak perbankan dan mitra koperasi memiliki prasyarat khusus berkaitan dengan pendanaan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi penting.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada bagian keuangan KSP Tirta Sari diketahui bahwa koperasi ini telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Dari sosialisasi tersebut koperasi menyusun laporan keuangannya untuk periode 2015 menyesuaikan dengan SAK ETAP, namun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan.

Karena di KSP tersebut baru menerapkan SAK ETAP di tahun 2015, maka peneliti tertarik untuk menjadikan KSP Tirta Sari sebagai objek penelitian. Dari penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti juga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan di KSP tersebut tergolong bagus. Hal ini terlihat dari sisa hasil usaha (SHU) pada KSP Tirta Sari yang selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah SHU pada KSP Tirta Sari di tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000, tahun 2014 sebesar Rp.35.000.000, dan tahun 2015 sebesar Rp.42.000.000. Sebagian besar SHU berasal dari pendapatan pada KSP Tirta Sari tersebut. Selain itu, KSP Tirta Sari ini termasuk salah satu koperasi tertua yang ada di kabupaten Banyuwangi, yang masih mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dibandingkan dengan koperasi-koperasi baru yang hanya bertahan antara 2-5 tahun saja meskipun memiliki SDM yang lebih maju.

Laporan keuangan yang disusun oleh KSP Tirta Sari selama ini telah dilaporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi kabupaten Banyuwangi. Namun, belum pernah diaudit oleh KAP maupun auditor independen karena menurut pihak koperasi dengan melaporkan laporan keuangan setiap bulan dan laporan tahunan pada saat rapat anggota tahunan ke Dinas Koperasi itu sudah cukup. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai audit atas laporan keuangan yang telah disusun KSP Tirta Sari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi penerapan SAK ETAP pada koperasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan mengambil judul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang penerapan SAK ETAP pada usaha koperasi dan menumbuhkan minat penelitian di bidang yang sama serta menambah sumber literatur dalam bidang akuntansi bagi pelaku usaha koperasi dan UKM.

2. Bagi KSP Tirta Sari

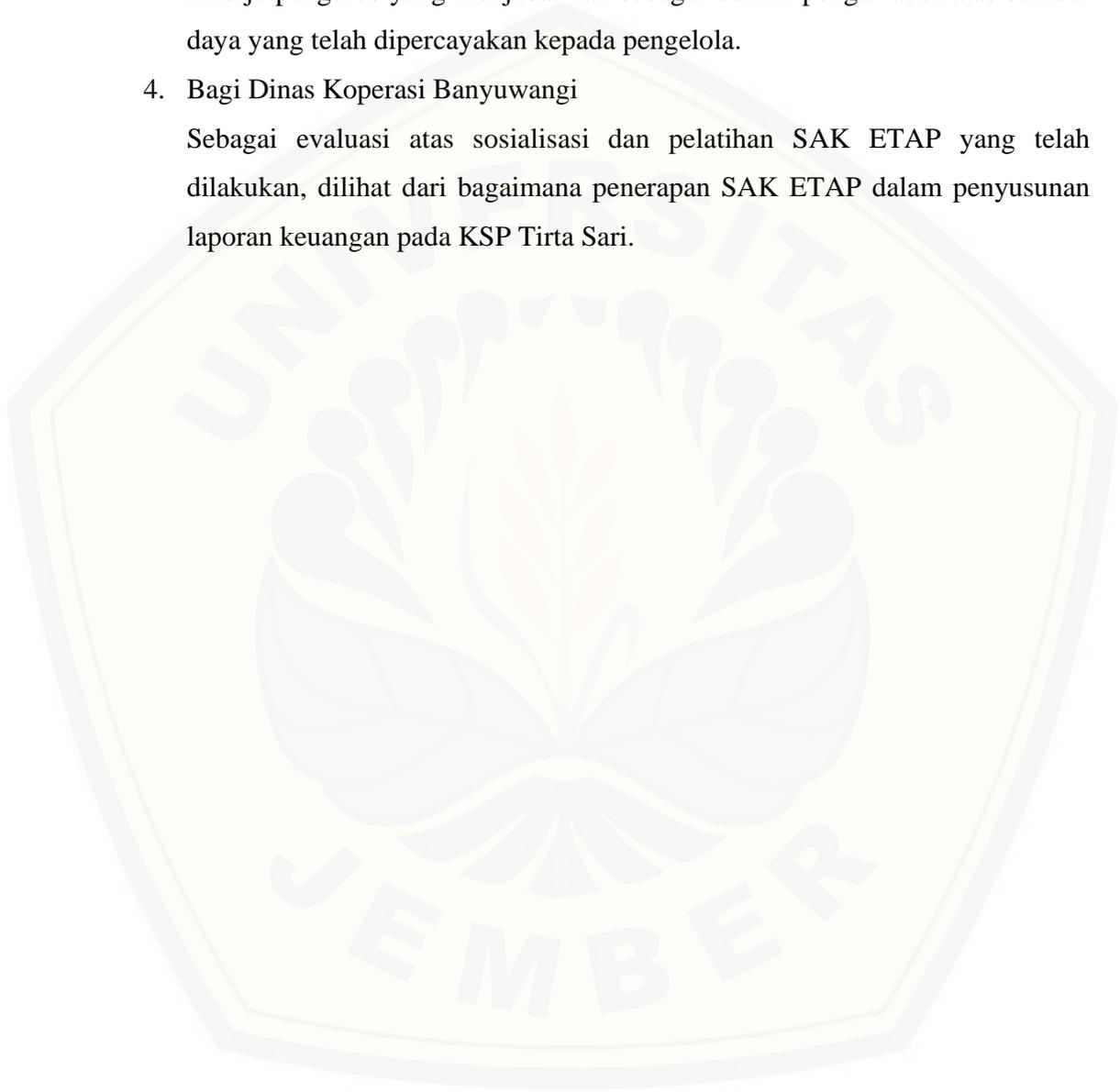
Sebagai *review* mengenai ketepatan penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh KSP Tirta Sari dan dapat dijadikan tambahan informasi dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi.

3. Bagi Anggota KSP Tirta Sari.

Hasil penelitian ini dapat digunakan anggota KSP Tirta Sari sebagai penilaian kinerja pengurus yang menjabat dan sebagai bentuk pengawasan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pengelola.

4. Bagi Dinas Koperasi Banyuwangi

Sebagai evaluasi atas sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP yang telah dilakukan, dilihat dari bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada KSP Tirta Sari.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung.

Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung pada kekuatan pemilik modal usaha sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ataupun badan hukum yang dijalankan oleh sekelompok orang dan bukan kumpulan modal dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip koperasi untuk menyejahterakan kepentingan anggotanya pada khususnya.

2.1.2 Tujuan Koperasi

UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 yang terdapat pada pasal 6 yaitu:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:
 - Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
 - Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
 - Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
- (2) Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

2.1.4 Landasan Hukum dan Azas Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 pasal 2 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-undang yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sedangkan unit simpan pinjam koperasi diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

Asas kekeluargaan yang menjadi landasan pelaksanaan koperasi mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut, semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Ulfah, 2013). Hal ini terbukti bahwa kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah rapat anggota.

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi (UU No.17 Tahun 2012 pasal 7). Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer. Menurut UU No.17 Tahun 2012 pasal 7 koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.

Dari pengertian tersebut maka dalam pendirian koperasi terdapat berbagai jenis koperasi. Penentuan jenis koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 83 adalah :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan

tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian (Anoraga dan Widiyanti, 2003:23).

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. UU No.17 Tahun 2012 pasal 50 menjelaskan bahwa pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Yang ketiga, manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 37 UU No.17 Tahun 2012.

2.3 Standar Akuntansi Koperasi

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK 27. Di dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Namun, pada 23 Oktober 2010, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan

Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PPSAK No. 8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau *IFRS*) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Pada jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV (Veronica, S., & Rudiantoro, R, 2011) menyebutkan bahwa lahirnya SAK ETAP dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan SAK khusus untuk UKM agar bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya. Terkait dengan kondisi di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2010.

Sebagai tambahan, (Martani, dalam Ulfah, 2013:15) menyebutkan bahwa entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP. Entitas dengan akuntabilitas publik yang

kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.

2.4 SAK ETAP

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2013:1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK No. 27 yang mengatur tentang pelaporan keuangan pada koperasi.

SAK ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk mampu membuat pelaporan keuangan sendiri. Selain itu SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam beberapa hal SAK ETAP dinilai lebih mudah dipahami karena dalam SAK ETAP terdiri dari seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Hal ini berbeda dengan PSAK yang menurut beberapa orang sulit. SAK ETAP ini disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik secara langsung pada penyusunan laporan keuangan.

Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP adalah tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

2.5 Kebijakan Akuntansi Menurut SAK ETAP

2.5.1 Pengakuan

Laporan keuangan menurut SAK ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan

catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan. SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, dalam paragraf 2.28 - 2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut.

1. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui di neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.5.2 Pengukuran

SAK ETAP paragraf 2.30 – 2.31 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar.

2.5.3 Penyajian

SAK ETAP dalam paragraf 3.2 - 3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP. Perihal timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut.

Kemudian dalam paragraf 3.6 - 3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Dalam hal jika terjadinya perubahan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus

mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraf 3.10 - 3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

2.6 Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP

2.6.1 Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.5, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2.6.2 Laporan Laba Rugi

SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos

penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 6.2.

Selanjutnya dalam paragraf 6.4 - 6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.6.4 Laporan Arus Kas

SAK ETAP menyebutkan dalam bab 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini dapat berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan, pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan cerminan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas tersebut dapat berasal dari pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap,

aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya, pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*, penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dalam *joint venture*, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada dan dari entitas lain.

3. Aktivitas Pendanaan

SAK ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.6.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam paragraf 8.1 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Lebih spesifik, SAK ETAP dalam paragraf 8.2 - 8.3 mengatur bahwa struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.

2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

2.7 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Putro	2013	Penerapan SAK ETAP Pada Perkoperasian Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan Yodium Farma Pt. Kimia Farma Tbk. Plant Watudakon	Pihak koperasi karyawan “Yodium Farma” belum melakukan penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan. Koperasi karyawan “Yodium Farma” belum menyajikan laporan keuangan secara penuh
2.	Ulfah	2013	Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi X	Sebagian besar klasifikasi pelaporan keuangan yang dilakukan koperasi X mengacu pada SAK ETAP, akan tetapi masih banyak kelemahan yang ditemukan. Ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu tidak terdapatnya pos saldo awal masing-masing komponen ekuitas sehingga dapat disimpulkan terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Tahun 2011. Disamping itu ditemukan pos akumulasi penyusutan pada laporan arus kas dari aktivitas investasi. Seharusnya laporan arus kas tidak memasukkan akumulasi penyusutan.

3.	Kurniatia	2014	Telaah Penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan UKM Keunggulan Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Perusahaan daerah Perkebunan Kahyangan Jember)	Perusahaan telah menyusun laporan keuangan lengkap dan menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kasnya. Pengakuan dan pengukurannya telah sesuai dengan SAK ETAP, namun masih ada beberapa pos yang seharusnya diakui dan tidak diakui oleh perusahaan seperti persediaan dan akumulasi penyusutan yang tidak disajikan secara terpisah. Perusahaan juga belum menyajikan secara rinci perhitungan perhitungan beban pokok dalam perhitungan laba rugi.
4.	Prasetyawan	2015	Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai Sak Etap (Studi Kasus Pada Kud Sumber Alam Ambulu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan belum sesuai SAK ETAP karena hanya menyajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca serta tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5.	Hertiyo	2015	Laporan Keuangan Koperasi Serba usaha Buah Ketakasi Berbasis SAK ETAP	Laporan keuangan yang disusun Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil usaha dan neraca dan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.
6.	Sepriana	2015	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus KUD Bendosari Kepanjen Kidul Kota Blitar)	Secara keseluruhan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KUD Bendosari sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam penerapannya, seperti tidak dicantulkannya jangka waktu piutang tak tertagih dalam CALK.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2012:3). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya; menganalisis suatu fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan; menyusun hipotesis yang berkenaan dengan prinsip dan konsep didasarkan pada data dan informasi yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan elemen penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data yang seperti apakah yang akan digunakan peneliti. Di dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2014:146). Pengumpulan data primer yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung pada penanggung jawab keuangan di KSP Tirta Sari. Disini, peneliti melakukan wawancara dengan teknik wawancara semiterstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti survei, observasi, dan dokumentasi (Sanusi, 2014:105). Teknik pengumpulan data berisi beberapa cara dan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:152). Pada penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan semiterstruktur dan lebih bersifat personal antara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus atau bagian keuangan di KSP Tirta Sari. Hal ini dilakukan agar data yang diberikan informan kepada peneliti merupakan penjelasan yang sebenarnya tanpa adanya kesempatan bagi informan untuk mengolah atau memanipulasinya. Sehingga, data yang diperoleh dari informan dapat dengan akurat diolah peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data yang bisa diolah untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data yang dimaksud

yaitu buku-buku perpustakaan, artikel, jurnal, dan laporan keuangan yang disusun oleh KSP Tirta Sari yang sudah disetorkan ke Dinas Koperasi kabupaten Banyuwangi serta catatan-catatan pendukungnya.

3.4 Lokasi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KSP Tirta Sari. Kegiatan usaha KSP Tirta Sari ini adalah unit simpan pinjam yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Alamat KSP Tirta Sari berada di Jalan Kembiritan nomor 20 kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi.

3.5 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012:330). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan dengan dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Patton, dalam Moleong, 2012:331).

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012:248). Menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2012:367) tahapan-tahapan analisis data kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

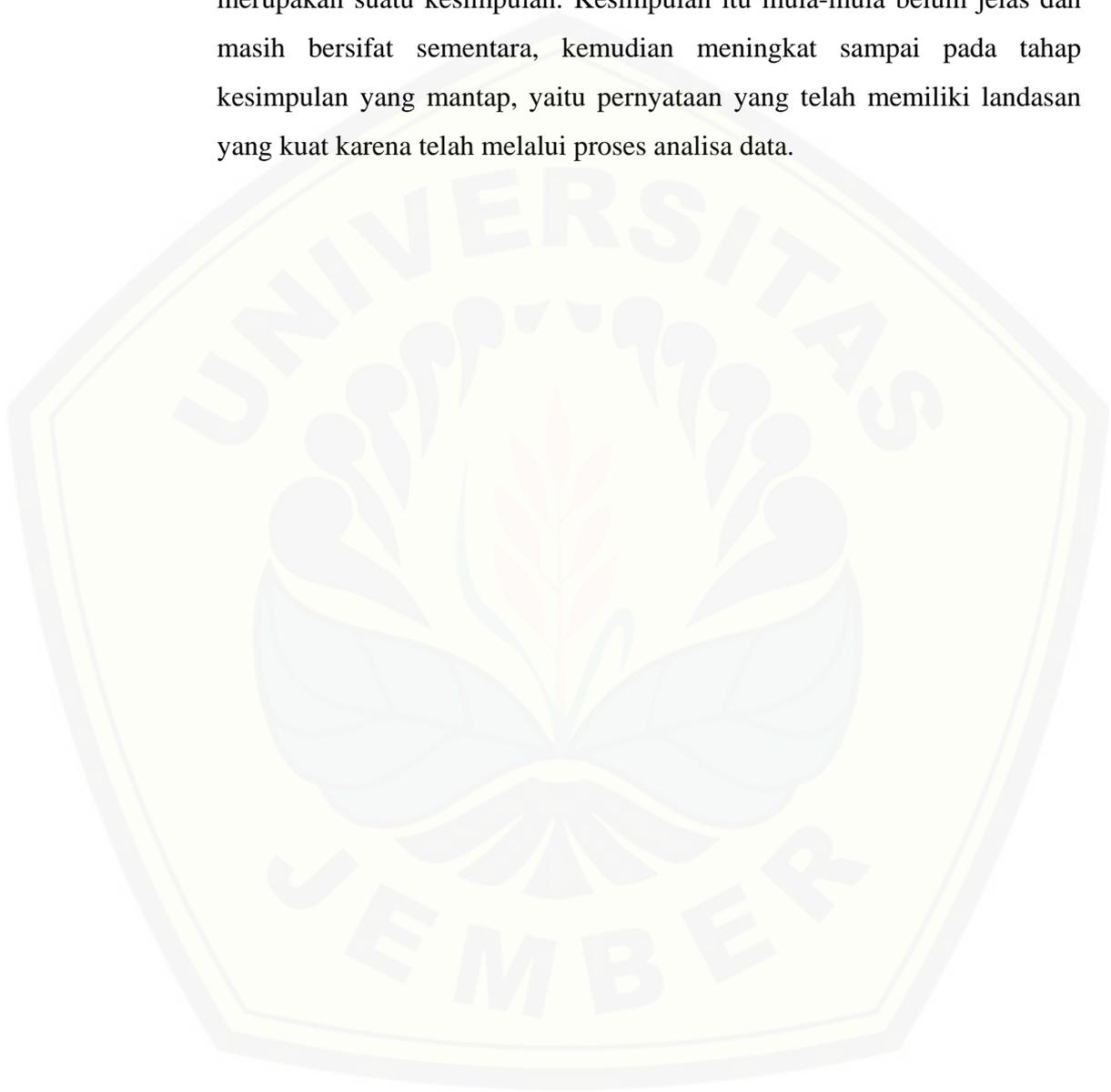
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yaitu membuat suatu rangkuman inti dari hasil pengumpulan data atau memilah-milah data yang dibutuhkan dan mereduksi data yang tidak dibutuhkan serta memfokuskan pada pelaporan keuangan yang dibuat oleh KSP Tirta Sari.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

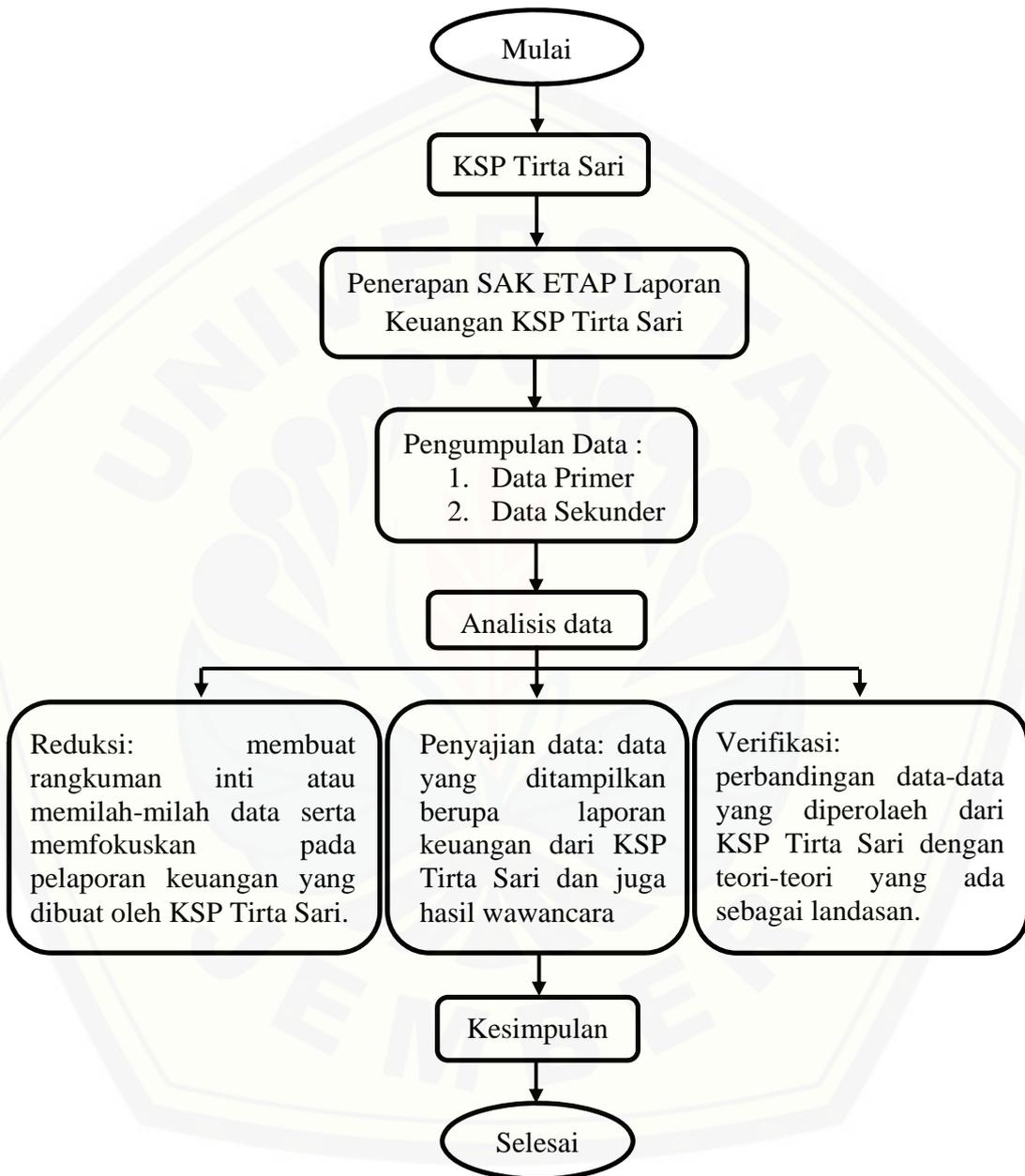
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk mensertakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti disini akan menampilkan data berupa laporan keuangan dari KSP Tirta Sari dan juga hasil wawancara dari responden.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisa data.



3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK ETAP di KSP Tirta Sari telah berjalan dengan baik, yaitu sebesar 76% sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan sisanya sebesar 24% yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah catatan atas laporan keuangannya karena di KSP Tirta Sari belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pengakuan pos-pos dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun masih ada beberapa pos yang seharusnya diakui dan tidak diakui oleh koperasi. Koperasi belum mengakui aset tetap secara terpisah di dalam neraca. Koperasi juga belum mengakui akumulasi penyusutan aset tetap secara terpisah atas masing-masing akumulasi penyusutan aset tetap. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan KSP Tirta Sari didasarkan atas biaya historis untuk aset tetap. Kewajiban, penghasilan, dan beban diukur berdasarkan nilai nominal/jumlahnya. Secara keseluruhan koperasi mengukur pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Penyajian laporan keuangan di KSP Tirta Sari juga sudah sesuai dengan SAK ETAP namun masih belum lengkap karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan (CALK).

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti pada KSP Tirta Sari. Peneliti memberikan beberapa saran diantaranya adalah :

- a. Sebaiknya KSP Tirta Sari segera membuat catatan atas laporan keuangan untuk periode mendatang. Karena hal ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 3.12 bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjas lainnya.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan beberapa narasumber/objek penelitian diantaranya KSP Milan, KSP Jamu, KSP Arum, KSP Tiara atau koperasi-koperasi yang lainnya sehingga dapat diketahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi secara lebih menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainung Kurniatia, Apriantini. 2014. Telaah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan UKM Unggulan Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Perusahaan daerah Perkebunan Kahyangan Jember). *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.
- Andika Hertiyo, Dimas. 2015. Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi Bebas SAK ETAP. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Anoraga dan Widiyanti. 2013. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Bina Adiaksara
- Athira Ulfah, Putri. 2013. Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi X. *Laporan Magang*. Depok: Univesritas Indonesia.
- Heriyato, S. 2012. Koperasi Didorong Penuhi Standar Akuntansi. <http://www.depkop.go.id/koperasi-didorong-penuhi-standarakuntansi.html>. [03 Maret 2016].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 124 hlm.
- Indriantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Minarni dan Sisdiyantoro. 2014. *Penelitian Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Di Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung.
- Prasetiawan, Yudha. 2015. Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.
- Rahmat Sahid. 2011. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman. <http://sangat26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> [03 Maret 2016]

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sepriana, Ratih. 2015. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus KUD Bendosari Kepanjen Kidul Kota Blitar). *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Veronica, S., & Rudiantoro, R. (2011). Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 2-3.

<http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/4706/overview-prestasi-dinas-koperasi-dan-umkm-kabupaten-banyuwangi-tahun-2015> [28 April 2016]

Lampiran 1

Lampiran Daftar Wawancara

Nama Perusahaan : KSP Tirta Sari
 Narasumber 1 : Bpk Heri Satimun
 Waktu : Rabu, 8 Juni 2016 pukul 09.00 WIB

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa posisi bapak dalam perusahaan ini?	Saya disini selaku ketua di KSP Tirta Sari ini
2. Apa pendidikan terakhir bapak?	Pendidikan terakhir saya SLTA
3. Berapa jumlah karyawan saat ini?	Jumlah karyawan di koperasi ini ada 10 orang
4. Apakah perusahaan bapak pernah mengajukan pinjaman/kredit ke Bank?	Pernah, di bank Jatim
5. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan tersebut?	Proses pencatatan laporan keuangannya masih manual
6. Apakah ada bagian atau divisi khusus untuk pencatatan akuntansi? Lalu siapa yang menyusun laporan keuangan harian dan bulanan di koperasi ini?	Tidak ada Untuk laporan hariannya disusun oleh kasir dan laporan bulannya saya yang membuat
7. Dalam membuat laporan keuangan, komponen laporan keuangan apa saja yang dihasilkan selama ini?	Laporan yang dihasilkan selama ini ada laporan piutang anggota, laporan pendapatan/jasa, laporan administrasi dan pendapatan lain-lain
8. Apa anda mengalami kesulitan atau masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan? Jika ada, kesulitan apa saja yang Anda alami?	Kalo kesulitan itu pasti ada, terutama pada SDMnya dan juga faktor usia para pengurus disini
9. Apakah bapak sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK ETAP? Kapan itu pak? Dan sudah berapa kali dilakukan pelatihan mengenai SAK ETAP ini?	Sudah Pelatihannya itu pada bulan Mei tahun 2014 sehingga kami mencoba menerapkannya pada tahun 2015 dan pelatihan hanya dilakukan sekali saja di dinas koperasi
10. Bagaimana menurut anda dengan hadirnya SAK ETAP yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku	Menurut saya dengan hadirnya SAK ETAP ini mempermudah kami dalam menyusun laporan keuangan dan laporan

koperasi dan UKM untuk menyusun laporan keuangan?	keuangan yang sesuai standar dapat dijadikan salah satu persyaratan dalam pengajuan pinjaman
Pertanyaan	Jawaban
1. Dalam menyusun laporan keuangannya, dasar apa yang digunakan pada koperasi ini? Akrual/kas basis?	Disini menggunakan akrual basis
2. Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada usaha Anda?	Pendapatan yang ada di koperasi ini ada pendapatan jasa pinjaman/bunga, pendapatan administrasi dari pinjaman dan pendapatan lain-lain
3. Kapan anda mengakui pendapatan yang masuk pada usaha Anda?	Pendapatan diakui ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan pendapatan
4. Bagaimana anda mengukur pendapatan pada usaha Anda?	Diukur berdasarkan nilai nominal dari pendapatan tersebut
5. Apa saja jenis-jenis biaya yang ada pada usaha Anda?	Yang jelas-biaya-biaya pada koperasi ini berupa gaji karyawan, biaya transport, perjalanan dinas, biaya perbaikan inventaris, pembelian ATK dan biaya lain-lain
6. Kapan anda mengakui biaya yang masuk pada usaha Anda?	Diakui ketika terjadinya transaksi
7. Apakah Anda membayar pajak penghasilan usaha Anda?	Iya, koperasi kami sudah membayar pajak penghasilan
8. Bagaimana anda mengukur biaya pada usaha Anda?	Biaya-biaya yang ada dalam koperasi ini diukur berdasar nilai nominalnya
9. Apa saja jenis-jenis aset yang ada pada usaha Anda?	Ada aset lancar dan aset tetap
10. Apa saja aset tetap yang dimiliki oleh koperasi ini?	Aset tetapnya adalah kendaraan pengurus, kendaraan operasional, dan peralatan kantor seperti komputer, AC, meja, kursi dll
11. Metode penyusutan seperti apa yang digunakan pada usaha Anda?	Di koperasi ini menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa sisa dan masing-masing disusutkan selama 4tahun
12. Kapan Anda mengakui aset dalam usaha Anda?	Aset diakui ketika terjadi transaksi
13. Bagaimana Anda mengukur aset tetap dalam usaha Anda?	Untuk aset tetap dalam koperasi ini diukur berdasarkan harga perolehannya

	ditambah dengan biaya-biaya yang digunakan sampai aset siap digunakan
14. Apakah semua aset dimasukkan dalam neraca? Apabila manfaat dari suatu aset tersebut dipandang tidak mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan, apakah aset tersebut tetap masuk dalam neraca?	Tidak, tetapi dimasukkan sebagai beban dalam laporan laba rugi
15. Di dalam neraca pada bagian aset lancar ada akun kas/bank, apa maksudnya?	Dibuat akun kas/bank itu karena sebagian kas yang dimiliki oleh koperasi ini berupa tabungan di bank
16. Apa saja jenis-jenis kewajiban atau utang yang ada pada usaha Anda?	Yang jelas kewajiban atau utang dalam koperasi ini adalah simpanan sukarela dari para anggota, simpanan berjangka, dan utang kepada bank
17. Bagaimana Anda mengakui kewajiban dalam usaha Anda?	Kita akui pada saat terjadi transaksi
18. Bagaimana Anda mengukur kewajiban dalam usaha Anda?	Ya diukur berdasarkan nilai nominalnya
19. Di dalam neraca ada pos kewajiban lain-lain, kewajiban apa saja yang dimaksud dalam KSP Tirta Sari?	Kewajiban lain-lain itu adalah sejumlah dana yang dialokasikan untuk dana pendidikan karyawan/anggota, dana pengurus, dana manajemen karyawan, dan dana social
20. Apakah Anda membuat laporan perubahan ekuitas?	Iya, kami membuat laporan perubahan ekuitas
21. Darimana sajakah sumber modal yang Anda peroleh?	Yang jelas sumber modal dalam koperasi ini berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, modal penyertaan dan juga dari utang bank
22. Pada kelompok ekuitas di neraca ada akun cadangan tujuan risiko, risiko apa yang dimaksud dalam akun tersebut?	Risiko yang dimaksud adalah kemungkinan piutang anggota yang tidak tertagih
23. Pada akun caadangan umum, itu dana yang dialokasikan untuk apa?	Itu adalah sejumlah dana yang akan dialokasikan untuk dana pengurus, dana sosial, dan dana manajemen karyawan dan pendidikan
24. Apakah Anda membuat laporan arus kas?	Iya, kami membuatnya
25. Bagaimana pengklasifikasian laporan	Diklasifikasikan sebagai aktivitas

arus kas yang Anda buat?	operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan
26. Metode apa yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas yang Anda buat?	Kami menggunakan metode tidak langsung untuk menyusunnya
27. Apakah Anda membuat catatan atas laporan keuangan (CALK)?	Tidak, kami tidak membuatnya
28. Mengapa di koperasi ini tidak membuat catatan atas laporan keuangan (CALK), bukankah laporan keuangan lengkap sesuai dengan SAK ETAP itu juga termasuk CALK?	Karena dengan membuat laporan seperti ini saja sudah diterima oleh dinas koperasi kabupaten dan mengenai SAK ETAP sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dari dinas. Pelatihannya hanya sekali dan tidak berkelanjutan sehingga kami kurang menguasai standar tersebut dan hanya menerapkan sebisanya saja.

Nama Perusahaan : KSP Tirta Sari
 Narasumber 2 : Sundari
 Waktu : Jum'at, 25 Juni 2016 pukul 10.00 WIB

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa posisi ibu dalam perusahaan ini?	Saya sebagai di koperasi ini
2. Apa pendidikan terakhir ibu?	Terakhir saya SLTA
3. Berapa jumlah karyawan saat ini?	Disini ada 10 orang karyawan
1. Apakah perusahaan ibu pernah mengajukan pinjaman/kredit ke Bank? 2. Dimana bu?	Pernah Di bank Jatim
5. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan tersebut?	Selama ini proses pencatatannya masih manual
6. Apakah ada bagian atau divisi khusus untuk pencatatan akuntansi?	Belum ada,saya sendiri yang menyusun laporan hariannya
29. Dalam membuat laporan keuangan, komponen laporan keuangan apa saja yang dihasilkan selama ini?	Ada laporan pendapatan/jasa, laporan administrasi, laporan piutang anggota, dan laporan pendapatan lain-lain
30. Apa anda mengalami kesulitan atau masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan? Jika ada, kesulitan apa saja yang Anda alami?	Ada, apalagi untuk menyesuaikan dengan standar baru yang diterapkan di tahun 2015. Hal ini sebenarnya karena tidak ada bagian khusus di bidang akuntansi
31. Apakah bapak sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK ETAP?	Sudah pernah di tahun 2014 tetapi hanya sekali saja di dinas koperasi
32. Bagaimana menurut anda dengan hadirnya SAK ETAP yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku koperasi dan UKM untuk menyusun laporan keuangan?	Dengan adanya SAK ETAP ini memudahkan pengurus dalam menyusun laporan keuangannya yang sesuai dengan standar khusus untuk koperasi dan UKM. Selain itu, laporan yang sesuai standar ini memudahkan kami jika ingin melakukan pengajuan kredit ke bank

Pertanyaan	Jawaban
1. Dalam menyusun laporan keuangannya, dasar apa yang digunakan pada koperasi ini? Akrual/kas basis?	Untuk menyusunnya kami menggunakan dasar akrual basis
2. Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada usaha Anda?	Pendapatan operasional yang meliputi pendapatan jasa pinjaman/bunga, pendapatan administrasi dari pinjman dan pendapatan lain-lain
3. Kapan anda mengakui pendapatan yang masuk pada usaha Anda?	Saat terjadinya transaksi
4. Bagaimana anda mengukur pendapatan pada usaha Anda?	Berdasarkan nilai nomial dari pendapatan tersebut
5. Apa saja jenis-jenis biaya yang ada pada usaha Anda? Apa saja yang termasuk biaya operasioal dan non operasional di koperasi ini?	Ada biaya operasional dan non operasional. Biaya operasinalnya ada beban bunga, beban umum dan administrasi dan lainnya. Sedangkan beban non operasionalnya adalah beban penyertaan
6. Kapan anda mengakui biaya yang masuk pada usaha Anda?	Biaya diakui ketika terjadi transaksi
7. Apakah Anda sudah membayar pajak penghasilan usaha Anda?	Sudah dan bisa dilihat di laporan laba rugi KSP Tirta Sari
8. Bagaimana anda mengukur biaya pada usaha Anda?	Biaya-biaya diukur berdasar nilai nominalnya
9. Apa saja jenis-jenis aset yang ada pada usaha Anda?	Ada aset lancar dan aset tetap
10. Apa saja aset tetap yang dimiliki oleh koperasi ini?	Kendaraan pengurus, kendaraan operasional dan peralatan kantor
33. Metode penyusutan seperti apa yang digunakan pada usaha Anda? Berapa umur manfaat untuk masing-masing aset tetap di koperasi ini bu?	Menggunakan metode garis lurus tanpa sisa. Umur manfaatnya sama untuk masing-maing aset tetap di koperasi in yaitu 4tahun
34. Kapan Anda mengakui aset dalam usaha Anda?	Aset diakui ketika terjadi transaksi
35. Bagaimana Anda mengukur aset tetap dalam usaha Anda?	Diukur berdasarkan harga perolehan dari aset tersebut dan ditambah dengan biaya-biaya yang digunakan sampai aset siap digunakan
36. Apakah semua aset dimasukkan dalam neraca? Apabila manfaat dari	Jelas tidak, jika sudah tidak ada manfaat ekonominya dimasukkan sebagai beban

suatu aset tersebut dipandang tidak mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan, apakah aset tersebut tetap masuk dalam neraca?	dalam laporan laba rugi
37. Di dalam neraca pada bagian aset lancar ada akun kas/bank, apa maksudnya?	Dibuat akun kas/bank itu karena sebagian kas yang dimiliki oleh koperasi ini berupa tabungan di bank
38. Apa saja jenis-jenis kewajiban atau utang yang ada pada usaha Anda?	Simpanan sukarela dari para anggota, simpanan berjangka, dan utang kepada bank
39. Bagaimana Anda mengakui kewajiban dalam usaha Anda?	Kita akui ketika terjadi transaksi berkaitan dengan kewajiban
40. Bagaimana Anda mengukur kewajiban dalam usaha Anda?	Berdasarkan nilai nominalnya
41. Di dalam neraca ada pos kewajiban lain-lain, kewajiban apa saja yang dimaksud dalam KSP Tirta Sari?	Kewajiban lain-lain itu adalah dana yang dialokasikan untuk dana pengurus, dana manajemen karyawan, dana pendidikan karyawan/anggota, dan dana sosial
42. Apakah Anda membuat laporan perubahan ekuitas?	Iya karena kan sudah menjadi ketentuan dalam SAK ETAP
43. Darimana sajakah sumber modal yang Anda peroleh?	Sumber modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan dan sebagian juga dari utang bank
44. Pada kelompok ekuitas di neraca ada akun cadangan tujuan risiko, risiko apa yang dimaksud dalam akun tersebut?	Itu adalah sejumlah dana yang disisihkan untuk menutup kemungkinan piutang tak tertagih
45. Pada akun caadangan umum, itu dana yang dialokasikan untuk apa?	Dana yang akan dialokasikan untuk dana pengurus, dana sosial, dan dana manajemen karyawan dana pendidikan
46. Apakah Anda membuat laporan arus kas?	Iya, koperasi ini membut laporan arus kas
47. Bagaimana pengklasifikasian laporan arus kas yang Anda buat?	Diklasifikasikan dalam 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan
48. Metode apa yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas yang Anda buat?	Menggnkn metode tidak langsung
49. Apakah Anda membuat catatan atas laporan keuangan (CALK)?	Tidak, kami tidak membuatnya

<p>50. Mengapa di koperasi ini tidak membuat catatan atas laporan keuangan (CALK), bukankah laporan keuangan lengkap sesuai dengan SAK ETAP itu juga termasuk CALK?</p>	<p>Karena dengan ke-4 laporan yang kami buat sudah diterima oleh dinas koperasi dan sudah bias dijadikan prasyarat dalam pengajuan kredit.</p>
---	--



Lampiran 2

